

PRIORITAS DIPLOMASI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

7

Humphrey Wangke

Abstrak

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) kini menjadi arena diplomasi Indonesia yang lebih tinggi dan luas. Status anggota tidak tetap mengangkat pengaruh Indonesia di mata dunia. Sebagai salah satu anggota, Indonesia bisa membawa sejumlah isu untuk dibahas di internal DK PBB dan mengapitalisasi modalitas yang dimilikinya agar dinamika internal anggota DK PBB berjalan sesuai dengan arah yang dituju. Terlalu banyak isu yang dibawa atau terlalu jauh isu yang diperjuangkan dengan kepentingan kawasan atau kepentingan nasional akan terlihat diplomasi Indonesia tidak mempunyai cukup pengaruh. Atas pertimbangan itu, diplomasi Indonesia di DK PBB akan terfokus pada empat isu saja, yaitu: memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia; memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB; meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas; dan terakhir, menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030. Kajian singkat ini akan membahas bagaimana prioritas diplomasi Indonesia di DK PBB dapat dilaksanakan dan dicapai.

Pendahuluan

Untuk keempat kalinya Indonesia dipercaya menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1 Januari 2019 sampai 30 Desember 2020. Sebelumnya, Indonesia telah menempati posisi yang sama pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan periode 2007-2008. Perjuangan menjadi anggota tidak tetap DK PBB sudah dilakukan sejak tahun 2016, karena pertimbangan bahwa dengan menjadi anggota tidak

tetap DK PBB peran Indonesia di tingkat kawasan dan global dapat meningkat sejalan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia. Dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan lebih praktis dan efisien dalam melaksanakan diplomasi damainya.

Menurut Presiden Joko Widodo ada empat prioritas Indonesia dalam DK PBB, yaitu pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia



dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai; kedua, memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB; ketiga, meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas; dan keempat, menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030. Oleh karena itu, fokus kajian dalam tulisan info singkat ini adalah bagaimana prioritas diplomasi Indonesia di DK PBB dapat dilaksanakan dan dicapai.

Prioritas Indonesia di DK PBB

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyusul terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, ada empat hal yang menjadi prioritas Indonesia dalam aktivitas diplomasinya di DK PBB. Keempat prioritas tersebut adalah: memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia; memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB; meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas; dan menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030

Dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas dunia, maka periode 2019-2020 menjadi peluang Indonesia menjadi pemain global yang sesungguhnya. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia tidak memiliki keberpihakan khusus pada negara-negara tertentu. Keberpihakan Indonesia adalah memperkuat tata kelola pemerintahan global, antara lain dengan memperbaiki sistem yang

berlaku di PBB dan memajukan perdamaian dunia.

Peran kawasan sangat penting dalam menopang perdamaian dan stabilitas dunia, sehingga harus diperkuat, mengingat posisi keamanan kawasan merupakan tulang punggung perdamaian dunia. Indonesia tentu saja akan selalu bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang bukan hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga strategis bagi keamanan Indonesia. Poros maritim dunia harus menjadi program utama di DK PBB, terutama terkait implementasi pilar kelima visi Presiden Joko Widodo, yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang andal. Di DK PBB Indonesia mewakili kawasan Asia-Pasifik.

Peningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas dapat dilakukan Indonesia dengan memberikan kontribusi positif, terutama terkait dengan isu *human security*. Upaya pencegahan dan penanganan konflik, terutama di wilayah Afrika, layak menjadi prioritas mengingat sebagian besar konflik di dunia dan hampir sepertiga dari pengungsi akibat konflik-konflik itu berada di Afrika. Ancaman kelaparan dan penyakit menular di Afrika hampir setiap tahun terjadi. Indonesia harus berkontribusi dalam penyelesaian instabilitas politik di wilayah Afrika, selain di Timur Tengah. Fakta tersebut memberikan gambaran masalah dunia sudah bergeser pada level pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Inilah yang menjadi tantangan DK PBB ke depan yang dapat dilakukan Indonesia. Jika diawal pendiriannya, PBB dibentuk untuk

menjaga keamanan dunia, dalam pengertian menjaga perdamaian dunia dari peperangan, maka pada saat ini PBB harus mampu menjawab tantangan atas keamanan manusia (*human security*).

Konflik internal antar-negara di benua Afrika secara otomatis akan mempengaruhi kelangsungan produksi pertanian. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah intervensi dari DK PBB. Persoalannya adalah, PBB secara kelembagaan mengalami kemacetan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Untuk itu, Indonesia perlu mendorong organisasi-organisasi regional Afrika, seperti Uni Afrika (*African Union*) atau Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (*Economic Community of West African States/ECOWAS*) untuk mengambil peran lebih aktif dalam memulihkan stabilitas keamanan di benua Afrika.

Meskipun data kelaparan secara global menurun, namun tingkat kelaparan ekstrim yang terjadi di benua Afrika sangat mengkhawatirkan. Persoalannya sangat beragam, mulai dari instabilitas politik dan keamanan di benua Afrika yang tinggi sampai masalah perubahan iklim yang mengganggu hasil produksi pertanian.

Dukungan Diplomasi Indonesia

Kondisi dunia saat ini semakin mengkhawatirkan akibat mulai ditinggalkannya nilai-nilai multilateralisme oleh sebagian besar negara didunia. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan bersama untuk membawa kondisi

konfliktual ke arah yang lebih baik. Di sinilah perlunya diplomasi Indonesia dalam mendukung kerja sama dan kolaborasi internasional agar semangat multilateralisme terus berlanjut. Caranya adalah dengan berusaha memajukan inisiatif-inisiatif negara berkembang, tidak hanya negara-negara maju.

Keinginan Indonesia untuk memajukan kerja sama antar-kawasan berbasis multilateralisme menjadi relevan bila dikaitkan dengan upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2030. Perlu kerja sama semua stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan agar hubungan antar-negara menjadi lebih harmonis. Kebijakan *me first* yang mengutamakan kepentingan domestik sudah harus ditinggalkan karena hanya akan membuat dunia semakin terpecah-pecah.

Saat ini masyarakat dunia sedang menghadapi setidaknya 2 ancaman besar. **Pertama**, krisis pangan (*food security*); **kedua**, perubahan iklim (*climate change*). Indonesia harus dapat memanfaatkan keanggotaannya di DK PBB dengan mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan, agar kedua ancaman itu teratasi. 154 negara di dunia sedang terlibat dalam Agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan. Berbasis multilateralisme, maka pembentukan *global partnership* yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan PBB 2030.

Kerja sama internasional juga dibutuhkan Indonesia

untuk mengatasi kejahatan transnasional. Pemerintah RI telah menetapkan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Ratifikasi protokol PBB ini merupakan suatu keharusan, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang tanpa batas, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi, telah mempengaruhi berbagai jenis kejahatan yang tanpa batas pula. Selain itu, anatomi kejahatannya yang terorganisasi di berbagai negara memerlukan kerja sama dengan negara lain untuk mempermudah penanggulangan.

Beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara adalah perdagangan manusia; penyelundupan orang, narkoba dan obat-obatan terlarang; korupsi dan pencucian uang; serta terorisme. Tujuan utama konvensi ini adalah sebagai media untuk mempermudah kerja sama antar negara, baik dalam rangka pencegahan kejahatan lintas negara maupun dalam upaya penegakan hukum, khususnya negara-negara yang telah meratifikasi protokol tersebut.

Masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB menjadi peluang untuk mewujudkan beberapa target pemerintah yang belum tercapai. Indonesia kini memiliki nilai tawar yang lebih dari sebelumnya di mata dunia, terutama untuk menggolkan agenda internasionalnya yang belum tercapai, yaitu menjadi poros maritim dunia. Pembentukan

poros maritim bukan hanya untuk mendorong kerja sama ekonomi serta pembangunan di kawasan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga menciptakan keamanan yang kondusif untuk menunjang kegiatan ekonomi.

Untuk menjaga stabilitas keamanan perairan, Indonesia dapat menempuhnya melalui *hard power* dan *soft power*. *Hard power* ditempuh melalui Program *Minimum Essential Force* (MEF), sementara *soft power* dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Selain *hard power* dan *soft power*, maka Indonesia juga dapat mengoptimalkan *smart power*.

Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia yang juga pemimpin ASEAN dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani *global security*. *Smart power* Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai Program Aksi ASEAN *Political-Security Community* (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik.

Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada beberapa perwira tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti perwira tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai komando Komando Maritim Misi PBB di Lebanon (*UNIFIL Maritime Task Force Commander*). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah.

Diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat

posisi Indonesia sebagai mediator konflik di Laut Cina Selatan. Dengan keikutsertaan sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik. Para diplomat Indonesia, dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai ketentuan Hukum Laut Internasional 1982. Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan menangani pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat dari Kementerian Luar Negeri RI, tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL dan Bakamla.

Penutup

Prioritas diplomasi Indonesia di DK PBB didasarkan atas kepentingan nasional dan kawasan dengan berbasis pada kerja sama multilateral. Dalam memperjuangkan prioritas tersebut, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tentu tidak mudah. Selain dinamika politik internasional yang terus berubah, ada anggota tetap DK PBB yang akan mendominasi isu dan mengarahkan agenda bahkan menjatuhkan veto. Untuk itu Indonesia harus lebih aktif memainkan pengaruh dan modalitasnya di tengah pertarungan kepentingan di antara mereka, sehingga DK PBB tidak terpenjara oleh kepentingan anggotanya.

Kerja sama dengan negara-negara sekawasan atau yang mempunyai kepentingan yang sama akan sangat membantu perjuangan diplomasi Indonesia di

DK PBB. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, Afrika dan Timur Tengah menjadi alternatif yang paling mungkin dalam membantu Indonesia mewujudkan cita-cita, yakni mewujudkan dunia yang aman, damai dan makmur. DPR RI, melalui diplomasi parlementernya, sudah tentu juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas diplomasi Indonesia di DK PBB, termasuk mengevaluasi implementasi kebijakan terhadap target-target agenda pembangunan global.

Referensi

- "Cara Damai Jadi Kunci Penyelesaian Isu Palestina", Kompas, 21 Januari 2019, hal. 18.
- "Hasan: PBB Kunjungi Papua 2019", Republika, 31 Januari 2019, hal. 7.
- "Indonesia Bantu Penyelidikan Bom Filipina, Kompas, 6 Februari 2019, hal. 4.
- "Indonesia Bela Pasifik Selatan di DK PBB", Kompas, 17 Januari 2019, hal. 5.
- "Indonesia dan Dewan Keamanan PBB", Kompas, 31 Januari 2019, hal. 6.
- "Indonesia Dorong DK PBB Gelar Rapat Tertutup", Kompas, 8 Februari 2019, hal. 5.
- "Indonesia Kecam Vanuatu Fasilitasi Separatis", Media Indonesia, 31 Januari 2019, hal. 2.
- "Indonesia Siap Masuk Dewan HAM PBB", Media Indonesia, 17 Januari 2019, hal. 5.
- "Menanti Kiprah Diplomasi Indonesia", Kompas, 30 Januari 2019, hal. 8.

“Mengamankan Jalur Sutra di Asia Selatan”, Kompas, 14 Februari 2019, hal. 5.

“Perjuangan di Balik Layar Diplomasi Indonesia”, Kompas, 13 Januari 2019, hal. 9.

“RI Resmi Menjadi Anggota tidak Tetap DK PBB”, Media Indonesia, 4 Januari 2019, hal. 11.

“RI Suarakan Hak Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB”, Media Indonesia, 24 Januari 2019, hal. 2.

“Two seats, one vision for UN Security Council”, The Jakarta Post, 4 Januari 2019, hal. 1.



Humphrey Wangke
humphrey.wangke@dpr.go.id

Dr. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada Tahun 2018 berhasil menyelesaikan studi S3 di Program Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Menjadi peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1990 dengan bidang kepakaran Masalah-masalah Hubungan Internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Perjanjian Kemitraan dan Kerja sama Indonesia-Uni Eropa” (2013); “Sekuritisasi Polusi Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara” (2014); dan “Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur di Indonesia” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.